



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 24 September 2016

Halaman: 2

Panwas Minta PNS Pemkot Tetap Netral

APS Bergambar HS dan IP Harus Diturunkan

JOGJA - Bersaingnya Wali Kota Harjadi Suyuti (HS) dan Wakil Wali Kota Imam Priyono (IP) dalam Pilwali Kota Jogja 2017, menimbulkan kekhawatiran mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Jogja. Termasuk pemanfaatan alat peraga sosialisasi (APS) bergambar HS maupun IP.

"Kami sudah meminta pemkot untuk menurunkan APS bergambar HS maupun IP. Kami beri tenggat waktu hingga 24 Oktober 2016 atau saat penetapan calon," ujar anggota Panwas Kota Jogja Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ferdian Susanto di Kantor KPU Kota

Jogja, kemarin (23/9).

Dari pengamatannya, APS paling banyak dipasang oleh Bagian Humas, Tata Pemerintahan, dan Dinas Kesehatan Pemkot Jogja. Menurut Iwan, APS yang berisi kegiatan atau sosialisasi Pemkot Jogja itu, masih banyak yang menggunakan gambar HS maupun IP.

Lokasi pemasangan APS pun beragam, mulai dari kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kelurahan hingga di titik-titik strategis Kota Jogja. "Sebelum penetapan paslon harus sudah dicopot," ujarnya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Panwas adalah netralitas PNS. Posisi HS sebagai wali kota dan IP sebagai wawali, menurut Iwan, rawan dimanfaatkan. Untuk itu Panwas me-

minta PNS bisa memilah perintah atasan apakah itu tugas kedinasan atau perintah yang mengarah ke mobilisasi politik. "Harusnya PNS sudah tahu tugas yang diberikan berbau muatan politis atau tidak," jelasnya.

Sanksi bagi PNS yang tidak netral pun sudah jelas. Diatur dalam Surat Edaran Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Undang-Undang Nomor 10/2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5/2014 tentang Netralitas ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Majunya duo pimpinan Pemkot Jogja dalam kontestasi Pilwali Kota

Jogja memang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja di Pemkot Jogja. Tapi HS sendiri menyatakan tidak ada masalah karena sesuai komitmen dengan IP menyelesaikan pemerintahan hingga 21 Desember nanti.

Menurutnya, dua pimpinan daerah maju bersaing tidak hanya terjadi di Jogja saja. "Saya hanya ber-khusnuzon (berprasangka baik). Nanti kan juga ada Pilh, terus penjabat wali kota," jelasnya.

Terpisah, IP mengatakan pemerintahan di Pemkot Jogja tidak akan berhenti meski wali kota dan wakilnya bersaing dalam Pilwali. Ia mengatakan sudah menjadi risiko dalam berdemokrasi jika akan kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus cuti. "Kami hormati dan jalankan saja regulasinya. Aturan berdemokrasi kita kan seperti itu," ujarnya. (pra/laz/fj)

v. Panwaslu
- Netral
- Biotra
- Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	sk Lanjut
----------	--------------	-----------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005